Perlindungan Ekosistem Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta

Levana Amadea Susandi, Eko Priyo Purnomo*, Alfat Ridho
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*eko@umy.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts to protect ecosystems through empowering communities around Mount Merapi National Park (TNGM). Mount Merapi National Park is in the Special Region of Yogyakarta. TNGM is a conservation area because it is used as a means of utilizing the maintenance of living natural resources and the surrounding ecosystem. This study uses a descriptive method that provides an overview of the relationships that occur in society such as processes, activities, views and the influence of phenomena that occur. This study uses a qualitative method that provides an overview of the relationships that occur in society such as processes, activities, views and the influence of phenomena that occur in this study. The result of this research is that the protection of Mount Merapi National Park is carried out by directly involving the community in its development and empowerment. All decision-making activities that involve the community in the management of Mount Merapi National Park can be started from the planning, implementation, activities, monitoring and evaluation stages. In maintaining the ecosystem, one of them is by managing tourism such as making flower gardens, besides that the government must also be involved in monitoring community-based tourism management.

Keywords*: National Parks; Society; Tourism*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan ekosistem melalui pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Taman Nasional Gunung Merapi berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. TNGM merupakan kawasan konservasi sebab digunakan sebagai sarana pemnafaatan pemeliharaan sumber daya alam hayati beserta ekosistem yang melingkupinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif yang memberikan gambaran terkait hubungan yang terjadi di dalam masyarakat seperti, proses, kegiatan, pandangan dengan pengaruh fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memberikan gambaran terkait hubungan yang terjadi di dalam masyarakat seperti, proses, kegiatan, pandangan dengan pengaruh fenomena yang terjadi dalam penelitian ini. Hasil penelitian yakni perlindungan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan dengan melibatkan langsung masyarakat kedalam pembangunannya dan pemberdayaannya. Seluruh Kegiatan pengambilan keputusan yang melibatkan masyakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi dapat diawali sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, monitoring dan evaluasi. Dalam melindungi ekosistem salah satu caranya dapat dilakukan dengan pengelolaan pariwisata seperti pembuatan Taman bunga, adapun pemerintah juga harus terlbat dalam mengawasi pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat tersebut.

Kata Kunci: Taman Nasional; Masyarakat; Wisata

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan dan pemanfaatan ekosistem melalui pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). *TNGM berada di Pakem, Daerah Istimewa* Yogyakarta. Ekosistem yang menyususunnya terdiri dari sistem hayati, lanskap serta sistem budaya yang unik (Muhamad, 2018). TNGM juga merupakan kawasan konservasi sebab digunakan sebagai sarana pemnafaatan pemeliharaan sumber daya alam hayati beserta ekosistem yang melingkupinya.(Narsuka et al., 2016).

Sesuai dengan SK: 134/MENHUT-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 kawasan TNGM merupakan kawan lindung yang secara administratif berada di empat kabupaten yaitu, Boyolali, Sleman, Klaten dan Magelang (Wijayati & Rijanta, 2019). Kawasan ini dilindungi karena memiliki potensi fauna yang tinggi, Berdasarkan hasil survey ditemukan 97 jenis burung (2.714 individu, 32 famili), dan 15 jenis mamalia (167 individu, 10 famili). Dari seluruhnya 4 jenis mamalia dan 17 jenis burung merupakan satwa yang dilindungi, 6 jenis memiliki nilai konservasi tinggi, 9 jenis satwa langka dan 23 jenis sisanya adalah endemi.

Situasi ekonomi dan sosial budaya yang telah melekat dengan kental di masyarakat setempat menjadikan pengelolaan maupun perlindungan kawasan taman nasional memiliki keterikatan yang kuat didalalmnya. (Narsuka et al., 2016). Menurut Isbandi dalam Andreeyan (2014) peran serta atau partisispasi masyarakat perlu dilakukani bersama dalam meninjau potensi yang ada, pengambilan dan pemilihan solusi alternatif dalam penanganan setiap masalah, upaya pelaksanaan dalam pengentasan masalah, dan yang terakhir mengevaluasi bersama masyarakat melalui setiap perubahan yang terjadi. Menurut Dwiyanto (2011) partisipasi masyarakat merupakan proses tahapan pembangunan yang terdiri dari design, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Menurut Barber dalam Garjita, et al (2014) menekankan bahwa, masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan kawasan lingkungan sekitarnya, karena mereka merupakan bagian komponen penting dalam perlindungan dan pemanfaatan hutan. Masyarakat tidak hanya sekedar berinteraksi seperti biasa terhadap kawasan lingkungannya, tetapi dalam hal ini masyarakat juga diberdayakan melalui aspek ekonomi agar partisipasi pengelolaan yang dilakukan sudah secara baik dan tidak merusak kawasan (Kristina et al, 2020).

Terdapat 30 desa yang langsung berbatasan dengan kawasan hutan. Interaksi antar masyarakat dengan kawasan hutan pun sudah terjadi bahkan sebelum wilayah ini ditunjuk untuk menjadi kawasan Taman Nasional. Keutuhan konservasi kawaan ini pun sedikit banyak juga dipengaruhi oleh interaksi antar kawasan dengan masyarakat (Garjita et al., 2014).

Kegiatan *illegal logging* yang tidak bertanggungjawab di kawasan hutan pun masih banyak dijumpai. Karena interaksi antar masyarakat dan kawasan hutan tersebut tinggi yang juga menyebabkan ketergantungan didalamnya, seperti, penebangan pohon secara liar, perumputan, penambangan pasir dan batu dan kehilangan atau pencurian hutan lainnya. Hal tersebut akan semakin mengkhawatirkan apabila tidak segera ditindak lanjuti, maka dibentuklah kawasan taman nasional guna salah satu alat pelestarian ekosistem. (Garjita et al., 2013)

Pemberdayaan masyarakat dalam kajian ekonomi melalui prospek pengembangan kawasan wisata taman kaliurang memang sudah tidak asing lagi untuk didengar. Berbagai kegiatan dan atraksi wisata dikelola dan dikembangkan dalam kawasan TNGM ini, yang tentunya sangat mendukung pengelolaan kawasan yang ada. Perkembangan sebuah kawasan wisata salah satunya dengan memprioritaskan keunggulan atraksi

wisatanya, hal tersebut tercantum dalam PP No. 68 Tahun 1998 mengenai kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam.

Tidak hanya terfokus pada satu wilayah pengembangan di kawasan kaliurang, tetapi mengacu pada kebijakan pengembangan yang ada bahwa kawasan wisata kaliurang akan mendistribusikan pengembangan wisatanya dan tidak hanya terkonsentrasi di dalam satu wilayah kawasan kaliurang saja. Seperti contoh pembangunan Kebun Bunga di Desa Hargobinangun dan Taman Rekreasi Anak-Anak di Kecamatan Pakem. Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan TNGM pun sudah pasti banyak dilakukan melalui potensi wisata yang dikelola.

Salah satu yang ditunjuk untuk menjadi "pilot project" merupakan Kecamatan Pakem yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, melalui pengembangan dan pemberdayaan potensi masyarakat daerah. Berikut produk yang menjadi keunggulan bagi wilayah Kecamatan Pakem, antara lain : jamur kuping, sutera alam dan sapi potong. Pengembangan wisata alam yang juga dibarengi dengan pengembangan ekonomi melalui gunung dan wisata alam melalui dukungan agribisnis dengan tetap memperhatikan konservasi air dan tanah. Akses image sebagai kawasan wisata dan jalan yang baik menjadikan Kecamatan Pakem mendapat dukungan dalam kawasan wisata kaliurang.

Penelitian ini bertujuan mengkaji prospek ekonomi dalam pengelolaan kegiatan wisata di kawasan taman wisata kaliurang yang bertepatan dengan perubahan kawasan gunung merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).

TINJAUAN PUSTAKA

Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman Hayati merupakan semua jenis makhluk hidup yang berada di muka bumi (mikroorganisme, tumbuhan dan hewan) yang didalamnya terkandung keanekaragaman ekosistem maupun genetik. Dengan adanya keanekaragaman hayati yang juga merupakan paru-paru dunia, tentu memberikan manfaat yang strategis dan vital guna mencukupi kebutuhan dasar Negara.

Menurut Alfiani (2014), terdapat empat tingkatan keanekaragaman hayati, yaitu, Pertama, keanekaragaman Ekosistem merupakan suatu kelompok biologi yang memiliki gabungan yang berbeda dengan lingkungan ekosistem (fisik) masing-masing. Kedua, Keanekaragaman Spesies merupakan seluruh gabungan makhluk hidup yang ada di bumi dan termasuk berbagai jenis bakteri. Ketiga, Keanekaragaman Hayati merupakan Keanekaragaman yang berbentuk dalam jasa lingkungan atau pun jasa ekosistem yang tentutnya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Keempat, Keanearagaman Genetik, merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis, maupun di antara individu-individu dalam satu populasi

Keanekaragaman hayati yang terus mengalami kemerosotan yang tentunya akan mengakibatkan kepunahan sudah sangat mengkhawatirkan. Ancaman kepunahan terhadap organism hidup sudah sangat besar. Bahkan tingkat kepunahan sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan kepunahan yang sudah pernah terjadi dan tercatat dalam sejarah di planet bumi ini.

Faktor utama penyebab ancaman kepunahan keanekargaman hayati di indonesia merupakan penggundulan hutan. Indonesia bahkan merupakan pusat dari penggundulan hutan yang berada di dunia. Sebesar 20 juta hektar dalam kurun waktu 32 tahun sejak tahun 1965 Indonesia harus kehilangan lahan hutannya.

Pemberdayaan Masyarakat

Manusia merupakan komponen utama yang memiliki peranan terpenting dalam pembangunan, konteks pembangunan ini saling berdampingan dengan konsep pemberdayaan, oleh sebab

itu pemberdayaan merupakan atensi yang penting bagi masyarakat sebagai cara untuk mengekspresikan kebebasan untuk bertanggung jawab ide, tindakan dan keputusan yang diambil (Maryani & Nainggolan, 2019). Osmani dalam (Haris, 2014) mendefenisikan Pemberdayaan adalah serangkaian kondisi dimana orang yang tidak berdaya menjadi poros yang dapat menciptakan dan mengendalikan situasi sedemikian rupa sehingga mereka dapat menyuarakan keinginannya serta dilibatkan langsung dalam kegiatan yang bersangkutan dengan pemerintah.

Sementara itu world bank menyimpukan pemberdayaan sebagai upaya untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta berhak memutuskan baik atau buruknya sesuatu yang akan diputuskan (Wijaya, 2015). Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya dilandasi empat hal, *pertama* diperuntukkan supaya individu, kelompok dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya. *Kedua* masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan, ketidak berdayaan dan segala bentuk keterbelakangan. *Ketiga* kegiatan pada masyarakat dapat diciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. *Keempat* kemauan keras dengan etos kerja yang kuat, akuntabel, efektif, efisien yang mengacu terhadap prinsip akutabilitas agar dapat membentuk iklim komunitas yang sehat, maju dan mandiri dalam tujuan membangun masyarakat (Haris, 2014).

Permberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam 3 dimensi, pertama *enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Kedua *empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. *Ketiga protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah (Noor, 2011).

Pemberdayaan itu proses dan tujuan (Pathony, 2020). Sebagai proses, pemberdayaan adalah rentetan aktivitas untuk meningkatkan kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, sebagai tujuan mengacu terhadap hasil dan kondisi yang ingin diraih dalam tatanan perubahan social yakni masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan yang disertai kemampuan untuk pengaplikasikan pengetahuan melalui pemenuhan kebutuhan hidupnya secara fisik ataupun social seperti keberanian menyampaikan gagasan, memiliki mata pencaharian, dan mandiri (Pathony, 2020).

Pada dasarnya, setiap proses pembangunan masyarakat mengandung tiga unsur yang disebut sebagai konsep dasar, yaitu adanya proses perubahan, mobilisasi sumber daya dan pengembangan kapasitas masyarakat (Hafit, 2017). Adapun pendekatannya dimungkinkan untuk penyelenggaran pembangunan yang berlandaskan memanusiakan manusia, artinya keterlibatan masyarakat harus berbentuk partisipasi bukan mobilisasi. Adanya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan diupayakan berperan sebagai produsen karena ikut andil dalam proses perumusan dan pembuatan, sehingga masyarakat adalah kesatuan dari program tersebut yang ikut bertanggungjawab terkait keberhasilannya dan pastisipasinya diharapkan berkelanjutan pada tahapan-tahapan setelahnya (Damanik, 2019).

Pemerintah memiliki peranan sebagai pihak yang memberikan fasilitas untuk masyarakat loKal dalam merencakan, menyumbang ide pemikiran, pengambilan keputusan serta mengelola

sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan sustainable development yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis (Suharto, 2014).

ANGKA DAN TABEL

Melalui kesepakatan bersama, maka didapatkanlah data mengenai peran serta responden dalam pengelolaan taman nasional yang sedang berjalan. Berbagai pertanyaan yang diajukan pun bersifat umum dengan kemauan dan kesediaan dalam mengikuti, melaksanakan dan menjaga setiap aturan yang sudah disepakati bersama. Berikut penjelasannya:

Tabel 1. Sebaran Responden Berdasarkan Tingkat Peran Serta

Kategori Tingkat Peserta	Responden	
	Jumlah	%
Rendah	24	20.0
Sedang	89	74.2
Tinggi	7	5.8
Total	120	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 1, sebesar 74,2% atau sebanyak 89 responden berada dalam tingkat sedang penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1. Sebanyak 23 responden tingkat SMA mendapatkan 69,9% peranserta tingkat sedang. Tingkat peran serta sedang pun juga mendominasi SD dan SMP dengan bayak 9 responden yang berarti memperoleh 88,9% dan 38 responden dan diperoleh hasil sebesar 73,7%. Melalui sebaran data yang diambil melalui beberapa responden menunjukkan setiap tingkat atau jenjang pendidikan menunjukkan hasil sebaran yang hampir sama sehingga memberi indikasi bahwa peran serta masyarakat hampir tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. (Narsuka et al., 2016)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan berupa metode deskriptif yang terkait dengan hubungan proses, kegiatan, pndangan, sikap yang sedang terjadi di masyarakat dan memiliki pengaruh besar dari suatu fenomena yang terjadi. Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini menggunakan bahan melalui berbagai sumber data spasial, bisa berupa informasi public atau pun institusional. Perolehan data secara institusional dengan laporan kegiatan dan pengcekan data dengan institusi terkait dan untuk perolehan data daring melalui web yang tersedia merupakan perolehan data secara informasi public. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu, primer dan sekunder. Primer yang diperoleh secara langsung ke lapangan sedangkan sekunder diperoleh melalui dokumentasi oleh pihak lain berupa file instansi, buku, dan lain-lain. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif dengan mengamati berbagai fenomena, pandangan, sikap dan proses-proses yang terjadi di lingkungan sekitar. Analisis ini juga dilakukan dengan survey, korelasi data-data terkait, studi strategi dan studi tindak lanjut.

Metode penelitian ini dilaksanakan di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat pun melalui pengembangan sektor wisata yang ada di wilayah kawasan kaliurang dan sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai pengelolaan dan pengembangan kegiatan wisata di kawasan kaliurang tidak lain dan tidak bukan sangat mengandalkan daya tarik lereng merapi bagian selatan sebaga keasrian alamnya. Keasrian alam yang disuguhkan memanjakan mata siapapun yang melihat dan menikmatinya, terlebih hal tersebut menjadi point utama dibangunnya kegiatan wisata dalam memanfaatkan keindahan alam yang telah

berkembang sejak lama di kawasan ini. Pembangunan kawasan wisata ini pun membawa dampak dan manfaat positif khususnya bagi masyarkat sekitar yang memiliki usaha sendiri seperti jasa wisata, mengelola penginapan dan usaha warung, dengan begitu masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan. Arah perkembangan kawasan wisata kaliurang ini akan sangat berpengaruh terhadap penetapan wilayah GM menjadi taman nasional yang dikelola langsung melalui TNGM.

Analisis ini berfungsi sebagai tumpuan progress terhadap berbagai ketentuan-ketentuan pengelolaan yang bersangkutan dengan kawasan taman nasional. Ada beberapa aspek dalam pengembangan suatu kawasan wisata antara lain : sosial, budaya, alam dan ilmu pengetahuan dan sosial. (Rizkana, 2014).

Analisis dukungan terhadap sektor kawasan wisata di wilayah Kecamatan Pakem juga dipengaruhi terhadap beberapa aspek seperti, perilaku wisatawan, lingkungan dan jumlah yang akan berpengaruh pada wilayah setempat, pusat kunjungan dan daya tamping wisatawan yang direncanakan (Anas & Belakang, 2012).

Kawasan Lindung

Hutan lindung merupakan fungsi pokok dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah intrusi air laut, mengatur tata air, mencegah banjir. Sedangkan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Dalam menciptakan kelestarian ragam hayati maka diperlukan sebuah wilayah atau kawasan yang berfungsi mendukung kelestariannya. Hal ini tentu merujuk pada fungsi kawasan lindung yang tentunya memiliki fungsi utama dalam kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Kawasan yang memberikan perlindungan ini antara lain, kawasan resapan air, hutan lindung dan kawasan bergambut. Terdapat 3 macam kawasan lindung yaitu, cagar budaya, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian.

Ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah ditetapkan menjadi hutan lindung, antara lain pertama, Hutan Lindung Sungai Wain, Balikpapan, Kalimantan Timur yang menjadi obyek wisata andalan. Kedua, Hutan Lindung Wehea Kutai Timur, Kalimantan Timur, hutan ini pernah mendapat penghargaan kalpataru oleh pemerintah pusat pada tahun 2009. Ketiga, Hutan Lindung Alas Kethu Wonogiri, Jawa Tengah merupakan hutan lindung yang banyak ditumbuhi kayu putih, jati, mahoni dan akasia. Keempat, Hutan Lindung Taman Raya Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat keunikan hutan ini karena ditumbuhi oleh bunga raksasa Rafflesia Arnoldi. Kelima, Hutan Lindung Baning, Sintang, Kalimantan Barat, hutan baning menjadi sarana wisata alam yang sangat diminati. Keenam, Hutan Lindung Betung Kerihun hutan ini terbentang dari gunung betung hingga gunung keihun. Ketujuh, Hutan Lindung Langsa Desa Paya Bujok Seulemak, Langsa Baro, Langsa, Aceh, hutan ini menjadi wisata kehutanan di tengah kota (Rimbakita, 2019).

Upaya mencegah kerusakan ragam hayati maka kawasan lindung memiliki beberapa tujuan guna pencegahan kerusakan lingkungan, dengan beberapa sasaran antara lain, air, satwa, iklim, tanah, tumbuhan, budaya, satwa dan nilai sejarah, dan juga mempertahankan keunikan alam, satwa, tumbuhan dan tipe ekosistem. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai ekosistem dan konservasi sumberdaya alam hayati yaitu, berusaha mewujudkan keseimbangan ekosistem serta kelestarian sumber daya alam hayati guna meningkatkan mutu kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Konservasi berasal dari kata Conservation yang terdiri dari kata con (together) dan servare (keep/save) yang mengartikan dalam memelihara apa yang kita miliki, tetapi dilakukan secara bijaksana. Adapun tujuan konservasi alam

dan perlindungan hutan antara lain, mejaga lingkungan, hutan dan kawasan hutan agar fungsi produksi, lindung dan konservasi tercapai secara lestari dan optimal (UU No 41 Tahun 1999).

Pengelolaan Taman Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mendefinisikan Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, hal ini dimanfaatkan dalam tujuan penelitian, menunjang budidaya, rekreasi, ilmu pengetahuan dan pasriwisata.

Pemerintah melaksanakan kawasan pelestarian alam dan pengelolaan pada suaka alam dan dikelola melalui sebuah institusi "Balai Taman Nasional" serta dikelola melalui sistem zonasi berdasarkan suatu rencana pengelolaan. Sistem pengelolaan tersebut disusun melalui beberapa aspek seperti, sosial budaya, ekologis, ekonomis dan teknis dengan berupa tujuan pengelolaan serta macam-macam garis besar kegiatan pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan yang telah ditetapkan/dirumuskan.

Aspek sosial budaya, ekologis, ekonomis dan teknis merupakan bagian dalam rencana pengelolaan yang bertujuan mengelola dan macam-macam garis besar kegiatan pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan yang telah ditetapkan. Kawasan Taman Nasional berdasarkan peraturan pemerintah dibagi menjadi 3 zona yaitu, zona rimba, zona inti, zona pemanfaatan atau zona lain. Berikut penjelasan mengenai zona kawasan Nasional yang telah ditetapkan pemerintah:

Pertama, Zona Rimba merupakan jenis zona yang memiliki keanekaragman hayati dan mendukung perkembangbiakan guna menjaga pelestarian zona pemanfaatan dan zona inti. Berbagai jenis satwa migran tertentu pun terdapat di jenis zona rimba, selain itu kegiatan wisata alam dengan sarana prasarana yang terbatas masih diperkenankan pada zona rimba ini.

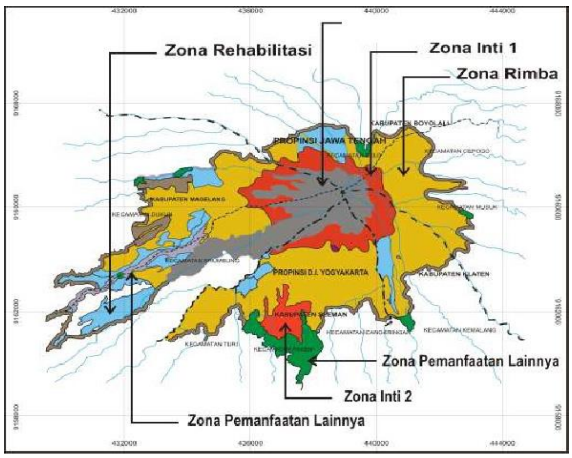

Gambar 1**.** Peta Zonasi TNGM

Kedua, Zona Inti kegiatan wisata dengan pembangunan sarana dan prasarana tidak diperkenankan pada zona ini, karena pada dasarnya zona ini diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan dan penelitian. Jika berbagai kegiatan masuk dalam zona ini maka dapat berpengaruh terhadap fungsi zona inti yang semestinya. Maka, pada zona ini hanya dilakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan.

Ketiga. Zona Pemanfaatan, pengembangan dalam kawasan zona ini cukup mendukung, terlebih zona ini memiliki luas dan daya tarik yang mampu menjamin kelestarian pengembangan yang diharapkan. Dengan tetap memperhatikan kepentingan konsrvasi diharapkan kegiatan pariwisata yang diterapkan pada zona ini mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Zona ini mendukung rencana pengelolaan dan dapat dibangun sarana prasarana kepariwisataan sesuai dengan yang diinginkan.

Zona ditambahkan menjadi empat dengan menambahkan Zona Penyangga. Zona ini secara ekologis berbatasan dengan kawasan taman nasional yang memiliki pengaruh baik dari luar maupun dalam kawasan, serta zona ini pun langsung berbatasan dengan kawasan taman nasional. Zona mutlak (Zona Inti dan Zona Rimba) wajib dilindungi dan merupakan fungsi dari Zona Penyangga, hal tersebut dilakukan guna sebagai jalur

pelindung dari kegiatan masyarakat yang dapat mengganggu ekosistem.

Pengelolaan yang diterapkan oleh pihak TNGM saat ini merupakan Pengelolaan Kolaboratif yang ditetapkan melalui Perundang-Undangan Peraturan Menteri No. 19/2004. Melalui peraturan tersebut kawasan konservasi menjadi suatu penanganan permasalahan yang dimiliki dalam pengelolaan efektifitas Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka alam yang berdasar pada kesepakatan dan kepemahaman, sesuai peraturan Perundang-Undangan yang sudah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah penyangga dan pengelolaan SDA TNGM berupaya meningkatkan pengelolaan sumber daya alamnya guna memenuhi tujuan yang diharapkan. Pengetahuan masyarakat dinilai sedang-baik mengenai TNGM apabila mampu bersifat komperhensif. Awal yang baik dalam suatu kondisi pengelolaan TNGM yang kolaboratif. Dibutuhkannya pengetahuan dan wawasan yang luas guna memunculkan pengaruh dan nilai positif dalam masyarakat, sehingga mempermudah masyarakat sekitar dalam perngelolaan dan perhatian yang akan diberikan terhadap TNGM. Peran serta dalm pengelolaan Taman Nasional tentunya sangatlah penting dan juga berpengaruh terhadap penilaian persepsi yang baik guna pembentukan perilaku.

Salah satu kunci keberhasilan dalam pelestarian kawasan konservasi tentunya peran serta yang dimunculkan saat pembentukan strategi pengelolaan lingkungan taman nasional. Guna mendukung peran serta dan partisipasi masyarakat maka dimulai dengan mendukung pembentukan kemitraan pemanfaatan dan pengelolaan yang berupaya dalam penanggung jawab dan mengembangkan rasa dalam mempertahankan dan menjaga keutuhan, kenyamanan, keamanan kawasan taman nasional beserta seluruh fungsi di dalamnya.

Dalam mewujudkan manajemen pengelolaan TNGM maka diperlukannya pembentukan komite atau organisasi lokal yang berperan aktif dalam pengelolaan yang dapat memberikan koordinasi dan berperan sesuai kompetensi. Pihak Balai TNGM, Pemerintah Dalam, maupun Lembaga Pemerintah Lain memerlukan penguat kelembagaan untuk memenuhi dukungan dalam pengelolaan taman nasional. Tidak hanya melalui SDM yang sudah ada, melainkan penguat kelembagaan juga memerlukan pembangunan dalam sarana prasarana guna menunjang segala bentuk aktivitas dalam bentuk pelestarian dan perlindungan kawasan taman nasional.

Adapun partisipasi masyarakat sekitar TNGM dalam ikut serta mengelola kawasan tersebut. Melalui hasil wawancara terhadap masyarakat Kalitengah Lor yang berbatasan langsung dengan wilayah TNGM menyatakan sebanyak 70% responden akan turut serta dalam mengelola kawasan tersebut apabila ada pihak TNGM yang juga melibatkan mereka. Tetapi sejauh ini belum banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam pengelolaan tersebut. Menurut Supriatna dalam (Haryadi et al, 2019) dalam membangun model pengelolaan kawasan konservasi dapat memanfaatkan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat tentunya akan berpihak pada masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian keanekaragaman hayati.

Belum terlaksananya secara menyeluruh berbagai kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh pihak TNGM terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kawasan konservasi TNGM. Sudah menjadi hal biasa masyarakat sekitar memanfaatkan produk dari kawasan TNGM secara tradisional bahkan sebelum ditetapkannya menjadi kawasan Taman Nasional, apabila dilarangnya masyarakat memasuki kawasan tersebut akan mengakibatkan masyarkat kehilangan sumberdaya alam yang mereka manfaatkan untuk bertahan

hidup. Sehingga memang sudah seharusnya pengelola taman nasional melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh rangkaian tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, monitoring dan terakhir evaluasi (Haryadi et al, 2019).

Dampak Pengelolaan Taman Nasional

Seiring dengan kemerdekaan yang diperoleh Indonesia pada saat itu, tidak memungkiri bahwasannya beberapa warisan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang ditinggalkan pada saat itu masih diadopsi dan dijalankan oleh pemerintahan Indonesia hingga sekarang. Salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang juga diadopsi oleh Indonesia saat itu ialah, pengelolaan kawasan merapi yang dikelola secara khusus, terlebih daerah ini merupakan wilayah rawan bencana dan sekaligus menjadi kawasan lindung guna menjaga fungsi hidrologis yang ada.

Tidak hanya fungsi hidrologis melainkan ekosistem, flora dan fauna pun mulai dikembangkan seiring dengan perkembangan kebijakan pengelolaan kawasan merapi. Pada saat kunjungan kerja Menteri Kehutanan ke Yogyakarta, dari situlah awal mula tercetus insiatif Gubernur DIY dalam meningkatkan pelestarian dan pembangunan kehutanan di wilayah DIY (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk.101/Menhut-Ii/2004). Perubahan status GM menjadi Taman Nasional ditawarkan langsung oleh Menteri Kehutanan pada saat pertemuan berlangsung.

Langkah-langkah pembentukan kawasan TNGM ini pun dipelajari betul-betul oleh Gubernur DIY setelah disepakatinya usulan perubahan kawasan oleh Menteri Kehutanan. Pada saat pembentukan kawasan tersebut, maka diikuti juga dengan pembentukan strategi kebijakan sumber daya alam di wilayah masing-masing yang tertuju dalam beberapa hal pokok sekaligus berdampak langsung terhadap lingkungan dalam pembuatan kawasan TNGM tersebut, antara lain :

1. Perubahan alih fungsi lahan pertanian yang akan dijadikan sebagai jalur infrastruktur dan pemukiman baru sebagai bagian dari konsekuensi pesatnya laju perkembangan kegiatan ekonomi dan penduduk setiap harinya.
2. Perlunya perhatian kawasan resapan air pada daerah-daerah tertentu khususnya dibagian tengah ke utara pemukiman wilayah Yogya.
3. Penambangan pasir vulkanis yang dilakukan di kawasan sungai mengakibatkan menurunnya dasar sungai sehingga berpengaruh terhadap berbagai pembangunan, bangunan sipil yang berada di atas sungai.
4. Rentannya bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor. Pembalakan dan pencurian kayu yang juga sangat rawan terjadi.
5. Perburuan dan pengambilan flora, fauna secara liar mengakibatkan penurunan jenis yang cukup drastis. (Narsuka et al., 2016)

Hal paling rawan terjadi dalam beberapa dampak negatif diatas seperti terjadinya bencana kebakaran hutan yang akan dengan cepat membumi hanguskan sebagian besar wilayah hutan. Ada 2 faktor yang menjadi penyebab kebakaran hutan yaitu, *pertama*, akibat pengaruh iklim, namun hal ini paling jarang terjadi dan hanya sebagian kecil. Kedua, akibat pemanasan global, seperti kemarau ekstrim yang berkesinambungan terhadap perilaku aktivitas manusia sehari-hari. Bahkan unsusr kelalaian yang disebabkan oleh manusia memberikan presentase sebesar 99% (Suhendri & Priyo, 2017).

Namun dari beberapa dampak negative yang ditimbulkan akibat perubahan kawasan hutan tidak serta melupakan sisi atau dampak positif yang dihasilkan, seperti :

1. Kawasan TNGM sebagai pelindung kelestarian alam kawasan GM
2. Material yang dibawa oleh Merapi pun sangat melimpah, guna menjadi penyubur kawasan sekitar ataupun untuk memenuhi kebutuhan papan. (Narsuka et al., 2016)

Kerusakan Lingkungan Kawasan TNGM

Menurut hasil data yang diperoleh melalui BNPB (2011) kerugian yang ditimbulkan akibat erupsi gunung merapi di tahun 2010 sebesar Rp. 3,56 triliyun. Rp. 1,69 triliyun nilai kerusakan (47%) dan Rp. 1,87 triliyun besar nilai kerugian. Empat kabupaten seperti, Yogyakarta, Magelang, Boyolali dan Klaten menjadi sasaran amukan letusan gunung merapi pada tahun 2010 lalu.

ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean) menjadi salah satu metode dalam penilaian kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. Nilai ekonomi bisa menjadi salah satu tolak ukur dalam perhitungan dampak yang akan didapat dari sebuah bencana. Terdapat tiga aspek dalam metode ECLAC seperti, dampak ekonomi makro dari kerugian dan kerusakan, kerusakan, kerugian. Indonesia pun kerap menerapkan sistem ini. (BNPB, 2011).

Dampak langsung yang ditimbulkan seperti kerusankan fisik (persediaan/stok dan bangunan). Dampak tidak langsung merupakan kerugian dengan sasaran sosial ekonomi dan rusaknya asset akibat bencana. Volume perekonomian wilayah seperti biaya sosial, pembiayaan public dan perekonomian mengalami imbas sampingan dari dampak ekonomi mikro yang merupakan dampak sekunder (BNPB, 2011).

Terdapat 5 sektor perhitungan dampak ekonomi, kerugian dan kerusakan antara lain lintas sektor (lingkungan hidup, pemrintah dan keuangan), perumahan, prasarana (telekomunikasi, transportasi udara dan darat, energy, air bersih irigasi dan sanitasi), ekonomi produktif (pariwisata, pertanian, industry, perikanan, perkebunan dan peternakan) dan sosial (agama, pendidikan dan kesehatan) (BNPB,2011).

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya perlindungan ekosistem Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan dengan pengelolaan pada sektor wisata yang berbasis masyarakat. salah satunya dilakukan pembentukan kemitraan pemanfaatan maupun pengelolaan yang mengupayakan tanggung jawab, mengembangkan rasa untuk mempertahankan serta menjaga keutuhan, kenyamanan, keamanan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi beserta seluruh fungsi yang berada didalamnya. oleh karena itu penting dilakukan pembentukan komite atau organisasi lokal yang berperan aktif dalam pengelolaan yang dapat berkoordinasi dan berperan sesuai kompetensi. sebagai sebuah contoh yakni pembangunan kebun bunga di Desa Hargobinangun ataupun Taman rekreasi di kecamatan Pakem. Adapun pemerintah ikut andil dengan memfasilitasi masyarakat lokal dalam proses menyumbang ide pemikiran, pengambilan keputusan serta mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiani, M. (2014). *Keanekaragaman Hayati*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Anas, H., & Belakang, L. (2012). Studi Perkembangan Wilayah Dan Daya Dukung Lingkungan Kepariwisataan Di Wilayah Yogyakarta Utara. *Jurnal Kawistara*, 2 (1): 1-9.

Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *E-journal Administrasi Negara*, 2 (4): 1938-1951.

BNPB. (2011). *Gema BNPB Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana*. Jakarta: BNPB.

Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

Dwiyanto, B. M. (2011). Model

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12 (2): 239-256.

Garjita, I. P., Susilowati, I., & Soeprobowati, T. R. (2013). Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Tani Desa Konservasi Sebagai Penyangga Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan:* 130-135.

Garjita, P., Susilowati, I., & Soeprobowati, T. R. (2014). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur Di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. *Jurnal Ekosains*, VI (1): 47-61.

Hafit. (2017). P3MD Yang Mempunyai Tujuan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kegiatan Menjadi Pengelolaan Salah Satu Dana Bergulir Yang RTM No 16 Tahun 2016 Tentang Program Publik. *Jurnal S1 Administrasi Publik*, 6 (2): 1-12.

Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. *Jupiter*, XIII (2): 50-62.

Haryadi, H., Sunarto, S., & Sugiyarto, S. (2019). Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merapi (Tngm) Provinsi Diy. *Prosiding Snpbs (Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan Saintek) Ke-4.K*.

Rizkana, K. (2014). Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kabupaten Karimun Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. UIN-Suska.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-Ii/2004 tentang *Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam*.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk.101/Menhut-Ii/2004 Tanggal 24 Maret 2004. *Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri PULP Kertas*. Yogyakarta: Kementrian Kehutanan Indonesia.

Kristina, N. M. R., Darma, I. G. K. I. P., & Ratnaningtyas, H. (2020). Pengelolaan Timbulan Sampah Untuk Menjaga Citra Industri Pariwisata Pada Daya Tarik Wisata Di Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(3): 223-233.

Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Muhamad, M. (2018). Tapak Ekologi Kepariwisataan Alam Pada Zona Pemanfaatan Di Taman Nasional Gunung Merapi (Tngm) (Konsep Pengembangan Kepariwisataan Alam Tematik Tapak Kawasan Kalikuning-Kaliadem Sebagai Kawasan Budaya Vulkanik). *Jurnal Kawistara*, 7 (3): 207-314.

Narsuka, D. R., Setiawan, B., & Cangkringan, K. (2016). Persepsi Dan Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Tngm. *Majalah Geografi Indonesia*, 23 (2), 90-108.

Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Civis*, I (2): 87–99.

Pathony, T. (2020). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kabupaten Subang. *Ijd-Demos*, 1 (2): 262-289.

Rimbakita. (2019). *Hutan Lindung-Pengertian, Status Fungsi & Kawasan*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2020 dari *https://rimbakita.com/hutan-lindung/*.

SK Menteri Kehutanan No.134/Menhut-Ii/2004 tentang *Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam Dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi*.

Perundang-Undangan Peraturan Menteri

No. 19/2004 tentang *Kehutanan*.

Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Suhendri, S., & Priyo P. E. (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Journal Of Governance And Public Policy*, 4 (1): 174-204.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

Wijaya, N. A. D. H. B. (2015). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang. *Jurnal Teknik PWK*, 4 (2): 253-268.

Wijayati, D., & Rijanta, R. (2019). Evaluasi Zonasi Taman Nasional Gunung Merapi. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3 (2): 92-106.

Yuda, P., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2017). Membangun Solidaritas Trans-Spesies Untuk Menghadapi Krisis Keanekaragaman Hayati Membangun Solidaritas Trans-Spesies Menghadapi Krisis Keanekaragaman Hayati. *Pidato Dies-44 Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*